



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penerapan Standar Pelayanan Minimal terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 yang terencana, terukur, bermutu dan akuntabilitas, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023-2026**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
7. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.

8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode tahun 2023-2026.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode eriode tahun 2023-2026.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk periode I (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM dimaksudkan sebagai pedoman :
 - a. bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi penerapan SPM; dan
 - b. penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM bertujuan untuk memenuhi target dan capaian pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal dalam jangka waktu menengah dan jangaka waktu pendek.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM dikoordinasikan oleh Tim Penerapan SPM Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Bupati selaku penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;

- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - d. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - e. Anggota, meliputi :
 - 1. unsur perangkat daerah membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 - 2. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. unsur Inspektorat Daerah;
 - 4. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 5. unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 6. unsur perangkat daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data, terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Pasal 3

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buton Selatan.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM, harus dapat menggambarkan target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek Daerah.
- (2) Target dan capaian jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan RPD Tahun 2023-2026 dan Renstra OPD.
- (3) Target dan capaian jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan RKPD tahunan dan Renja OPD.

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Penerapan SPM disusun dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Penerapan SPM di Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib.

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan RAD-SPM dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui audit, revidu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM meliputi kegiatan :

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. revidu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM OPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 22 Mei 2023

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 22 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,

LA ODE KARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 MEI 2023
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BUTON
SELATAN TAHUN 2023-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan karuniaNya, proses penyusunan Peraturan Bupati Buton Selatan tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Daerah Penerapan SPM) Kabupaten Buton Selatan tahun 2023-2026, dapat diselesaikan pada waktunya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Buton Selatan melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1. LATAR BELAKANG	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH	
1.3.1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH	6
1.3.2. TOPOGRAFI	8
1.3.3. HIDROLOGI	9
1.3.4. DEMOGRAFI	10
1.3.5. KAWASAN RAWAN BENCANA.....	12
1.3.6. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI.....	14
1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM	18
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	20
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM	20
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	24
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	28
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI.....	28
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	38
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM	79
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM	79
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1. KESIMPULAN.....	85
5.2. SARAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022	20
Tabel 2.2	Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022	21
Tabel 2.3	Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022	22
Tabel 2.4	Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022	22
Tabel 2.5	Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022	23
Tabel 2.6	Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022	38
Tabel 3.1	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Buton Selatan 2023-2026	37
Tabel 3.2	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Selatan 2023-2026	42
Tabel 3.3	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Selatan 2023-2026	58
Tabel 3.4	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Selatan 2023-2026	60
Tabel 3.5	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Buton Selatan 2023-2026	62
Tabel 3.6	Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Buton Selatan 2023-2026	66
Tabel 4.1	Evaluasi pencapaian indikator SPM	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, dan keikhlasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Mimika menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Wilayah Umum

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada pertengahan tahun 2014 menjelang akhir kepengurusan DPR RI Periode 2009-2014. Kabupaten Buton Selatan, secara geografis terletak pada 5^o28'46" Lintang Selatan sampai dengan 6^o54'27" Lintang Selatan dan 122^o13'01" Bujur Timur sampai dengan 122^o49'23" Bujur Timur dengan luas kurang lebih 51.771 (lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar, terdiri atas:

- a. Kecamatan Batauga;
- b. Kecamatan Sampolawa;
- c. Kecamatan Lapandewa;
- d. Kecamatan Kadatua;
- e. Kecamatan Siompu;
- f. Kecamatan Siompu Barat; dan
- g. Kecamatan Batu Atas.

Batas wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 terdiri atas:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kota Baubau dan Kabupaten Buton;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Laut Flores;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Laut Flores; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Kabupaten Buton Selatan memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 546,68 km² sesuai dengan draft RTRW tahun 2021/2041. Berdasarkan Sistem Informasi Geospasial bahwa luas kawasan Perairan Laut Kabupaten Buton Selatan sebesar 668,32 Km². Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG), Luas setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Buton Selatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

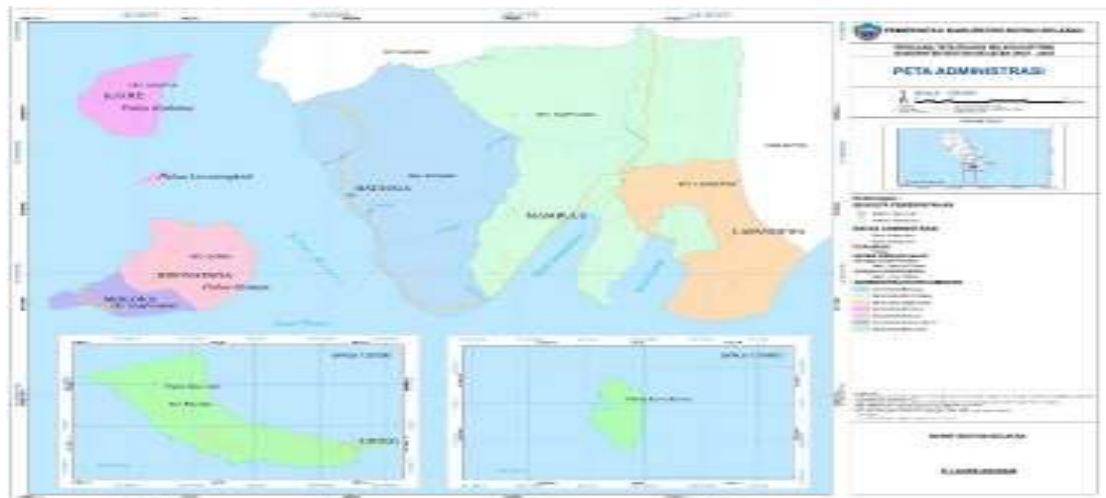
Tabel. 2.1.

**Luas Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Buton Selatan
Berdasarkan Analisa GIS Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Kecamatan Batauga	14.852,92
2	Kecamatan Sampolawa	22.195,39
3	Kecamatan Lapandewa	8.967,31
4	Kecamatan Kadatua	2.403,95
5	Kecamatan Siompu	3.862,16
6	Kecamatan Siompu Barat	1.458,40
7	Kecamatan Batu Atas	918,53
Total Luas Daerah		54.658,69

Sumber: Penghitungan dengan Pendekatan GIS, 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Sampolawa dengan luas 22.195,39 Hektar. Luas administrasi dari tujuh kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan seperti yang telah dijelaskan diatas, lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Buton Selatan.



**Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan**

Sumber: Draft RTRW Kabupaten Buton Selatan 2022-2042

1.3.2 Topografi, Geologi dan Jenis Tanah

Secara geografis Kabupaten Buton Selatan sebagian daratannya berada di Pulau Buton dan Pulau-pulau kecil di sekitarnya yang dilingkupi oleh perairan laut lepas, dengan relief pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah dan undak-undak pantai hasil pengangkatan serta pesisir dan paparan laut dangkal-menengah-dalam. Kabupaten Buton Selatan berada pada ketinggian 0-800 m di atas permukaan air laut, yang mempunyai sudut lereng 0 – 8 %, 8 -15 % dan 15 -25 % serta 25 -45 %.

Kondisi geologi dan tata lingkungan di Kabupaten Buton Selatan memberikan gambaran tentang satuan geomorfologi. Adapun satuan geomorfologinya dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Satuan Geomorfologi perbukitan lipat patahan;
- b. Satuan Geomorfologi Perbukitan lipatan;
- c. Satuan Geomorfologi Perbukitan undak-undak terumbu karang;
- d. Satuan Geomorfologi dataran rendah pantai.

Keempat satuan geomorfologi tersebut di atas dikendalikan oleh factor litostratigrafi (susunan batuan) dan struktur geologi perlipatan dan patahan. Dari hasil pelapukan dari beberapa jenis litostratigrafi di wilayah Kabupaten Buton Selatan akan berubah menjadi tanah yang terdiri dari:

- a. Tanah Kambisols tanpa menunjukkan adanya gejala hidromorfik;
- b. Tanah Litosols yang dicirikan oleh lapisannya yang sangat dangkal;
- c. Tanah Aluvium yang berlambang dari endapan sungai (Fluviatil), dengan solum yang cukup dalam dengan drainase buruk;
- d. Tanah Organosol yang beasal dari bahan organik, dimana mempunyai kadar gambut 150-200 cm; dan
- e. Tanah Gleisols yang selalu jenuh air dengan kondisi tanah yang belum matang; dan Tanah Podolik yaitu tanah yang berasal dari bahan induk batu lempung yang kaya K-Na Feldspar.

1.3.3. Hidrologi

Kondisi hidrografi dan geohidrologi di Kabupaten Buton selatan dapat digambarkan melalui pola aliran sungai dan genetika aliran sungai.

1) Pola Aliran Sungai

Secara umum pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah:

- a. Pola aliran dendrifik yang menjadi pertanda bahwa sifat fisik pada DAS relative homogen terdapat di sungai Wondoke;
- b. Pola aliran radial dan sentripetal yang mengikuti puncak topografi yang relative melingkar mengikuti pole Punggung Baratnya Buton Selatan terdapat di kepulauan berupa aliran;
- c. Pola Trellis dan Rektaguler yang dikendalikan oleh pola struktur sesar atau patahan serta perlipatan yang berarah Timur Laut – Barat Daya; dan
- d. Pola paraler di sungai DAS Sampolawa dan batauga.

2) Genetika Aliran Sungai

Keberadaan struktur Geologis (patahan dan pelipatan) mengontrol keberadaan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan genetika aliran sungainya, maka sungaisungai utama dan anak-anak sungai di Kabupaten Buton Selatan dapat di Kelompokkan menjadi:

Sungai Konsekuen dimana aliran sungai searah dengan arah kemiringan lapisan sedimen yang mengarah ke arah Barat Laut untuk sayap antiwin sebelah barat Laut dan mengalir searah kemiringan lapisan ke arah Tenggara dari Sayap antiklim Tenggara;

Sungai Subsekmen dimana sungai-sungainya mengalir searah dengan arah jalur/strike perlapisan yang ke arah timur Laut- Barat Daya; dan

Tingginya tingkat kerapatan sungai di wilayah Kabupaten Buton Selatan, maka sebagian besar kawasan ini menjadi areal peresapan air yang meresap (recharge) air tanah bagi Kabupaten Buton Selatan dan Kota Baubau.

1.3.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Buton Selatan mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 95.472 jiwa pada tahun 2021 dengan angka sex ratio per 1.000 adalah 102,14 yang berarti bahwa untuk setiap 100 orang perempuan terdapat sekitar 102 orang laki-laki. Sebaran jumlah penduduk dan laju pertumbuhan yang dirinci per kecamatan ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Karakteristiknya Menurut Kecamatan
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan 2010-2021 (%)	Distribusi (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	Sex Ratio
Batu Atas	12.328	4,08	12,91	1.338,19	104,46
Lapandewa	9.872	2,41	10,35	109,93	104,50
Sampolawa	23.628	1,60	24,77	106,30	101,43
Batauga	17.842	2,44	18,69	119,89	102,15
SiompuBarat	10.407	2,50	10,91	712,76	102,49
Siompu	11.196	2,48	11,74	289,46	102,01
Kadatua	10.199	2,78	10,64	421,59	100,45
Buton Selatan	95.472	2,46	100,00	174,29	102,14

Sumber: Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka, 2022

Melihat indikator kependudukan yang lain yakni struktur distribusi penduduk Buton Selatan, maka terlihat bahwa Kecamatan Sampolawa mendominasi domisili penduduk yang mencapai 24,77 persen atau memiliki penduduk sebesar 23.628 jiwa. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling sepi yakni Kecamatan Lapandewa dengan jumlah penduduk sebesar 9.872 jiwa (10,35 persen). Melihat sekilas persebaran penduduk maka terlihat cukup meratanya struktur distribusi kependudukan di Buton Selatan kecuali daerah Sampolawa dan Batauga yang merupakan ibukota Buton Selatan.

Banyaknya jumlah penduduk belum menjadi tingginya kepadatan penduduk suatu wilayah. Begitu juga di Buton Selatan dimana Kecamatan Sampolawa meskipun memiliki jumlah penduduk yang banyak namun kepadatan penduduk hanya sebesar 106,30 jiwa/km². Hal ini dikarenakan luas wilayah yang luas tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang berdomisili. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Batu Atas dengan kepadatan penduduk 1.338,19 jiwa/km². Jika dilihat secara umum, kepadatan penduduk Buton Selatan mencapai 174,29 jiwa/km², yang mengindikasikan bahwa dalam radius 1 km² terdapat penduduk yang tinggal sebanyak 174 jiwa.

Gambar 2. 2



Sumber: Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka 2022 (Hasil Olahan RPD)

Analisis kependudukan salah satu nya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk Buton Selatan, menggambarkan sebagian besar penduduk berada pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang yang masuk dalam usia produktif. Jumlah penduduk usia muda ini merupakan potensi yang perlu diikuti oleh upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

1) Rawan Tanah Longsor

Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam kawasan rawan tanah longsor, meliputi: Kecamatan Batauga, Kecamatan sampolawa, yaitu desa Jayabakti, Kecamatan Siompu dan Kecamatan Siompu Barat serta Kecamatan Lapandewa.

2) Rawan Gempa Bumi

Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam sesar besar (Mayor) di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Sedangkan Kecamatankecamatan yang termasuk kedalam Sesar Kecil (minor) di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Berdasarkan data yang termuat dalam peta Seismo Tektonik Indonesia dari Pusat Survei Geologi Indonesia tahun 2014 riwayat kejadian pada Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut:

Sebelah Timur Pantai Kecamatan Wabula (Kabupaten Buton) yang berbatasan dengan Kecamatan Lapandewa (Kabupaten Buton Selatan) dengan kedalaman pusat gempa yang berada di laut diatas 150 Km dengan kekuatan gempa di atas 6 SR;

Pulau Batu Atas sebelah Barat yang pusat gempunya terdapat di laut dengan kedalaman di atas 150 Km dan kekuatan gempa antara 5 – 6 SR;

Pusat gempa yang terletak di antara Pulau Kadatua, tepatnya di Teluk Lasongko dengan kedalaman di atas 150 Km, dan kekuatan gempa nya di antara 5 – 6 SR; dan

Bencana Gempa juga pernah terjadi dengan kekuatan gempa sekitar 5-6 SR terjadi dikedalaman 20 Km di kecamatan Batauga.

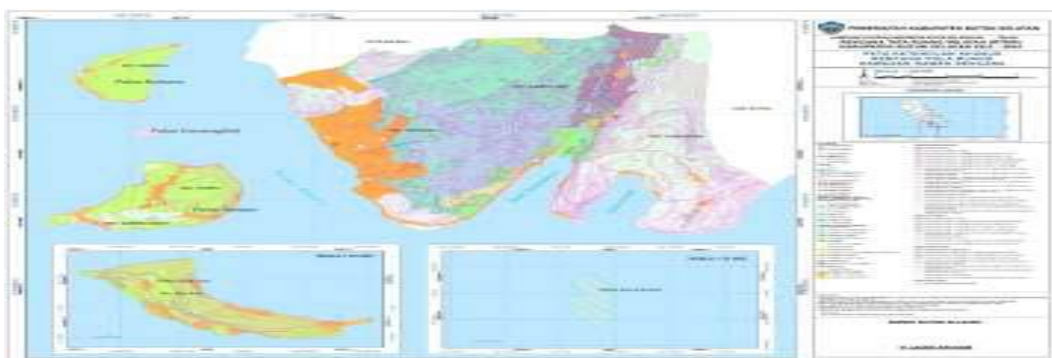
3) Rawan Tsunami

Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam kawasan rawan gelombang pasang meliputi seluruh pesisir di Kabupaten Buton Selatan.

4) Rawan Banjir

Kecamatan-kecamatan yang termasuk kedalam kawasan rawan banjir, meliputi: Kecamatan Batauga dan Kecamatan Sampolawa.

Gambar 2.3.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Buton Selatan



Sumber: draft RTRW Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022-2042

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Buton Selatan utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Buton Selatan. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Buton Selatan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Perekonomian Wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga Pendapatan Regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buton Selatan secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB dua tahun terakhir yakni tahun 2020 sebesar -0,71% mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2019 sebesar 5,94%, hal tersebut diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi secara global. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan meningkat kembali menjadi sebesar 2,29% pada tahun 2021.

Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami kenaikan, Nilai PDRB per kapita Buton Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita

tercatat sebesar 31,73 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 35,78 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Buton Selatan dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 2.3.
PDRB PerKapita Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017-2021

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah)					
ADHB	2.464,265,38	2.693.687,66	2.937.029,02	2.924.729,80	2.975.771,6
ADHK	1.864.283,77	1.966.490,22	2.083.348,81	2.068,594,74	2.080.195,2
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)					
ADHB	31,17	33,68	36,36	35,78	36,66
ADHK	23,58	24,59	25,79	25,30	25,81
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK	5,85	4,26	4,89	-1,88	4,90
Jumlah Penduduk (orang)	79.053	79.979	80.785	81.753	95.472
Pertumbuhan Penduduk (persen)	1,07	1,17	1,01	1,20	1,28

Sumber : Kabupaten Buton Selatan dalam angka, 2022

Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita seharusnya secara positif akan meningkatkan daya beli pasar Buton Selatan. Kondisi ini memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila dapat direspons dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter pasar Buton Selatan yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif. Pasar lokal Kabupaten Buton Selatan diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar. Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Buton Selatan paling besar disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sub sektor pertanian. Perkembangan PDRB dan peran sektor pada pembentukan PDRB Kabupaten Buton Selatan selama tahun 2016 hingga tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Distribusi PDRB adh Berlaku Menurut Kategori Lapangan Usaha
(%) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016-2021

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,97	30,18	30,56	30,94	32,83	33,56
B	Pertambangan dan Pengalihan	30,49	30,62	30,12	29,37	26,92	24,12
C	Industri Pengolahan	3,82	3,81	3,56	3,46	3,51	3,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29	0,28	0,27	0,25	0,27	0,26
F	Konstruksi	14,41	14,04	14,27	14,74	14,79	16,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,07	8,41	8,67	8,74	8,41	8,91
H	Transportasi dan Pergudangan	0,87	0,88	0,87	0,88	0,89	0,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13
J	Informasi dan Komunikasi	0,91	0,92	0,90	0,95	1,01	1,03
K	Jasa Keuagandan Asuransi	0,91	0,89	0,85	0,84	0,86	0,89
L	Real Estate	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,59	2,46	2,47	2,47	2,52	2,52
P	Jasa Pendidikan	5,39	2,32	5,29	5,23	5,68	5,84

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,30	1,30	1,31	1,47	1,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,67	0,64	0,62	0,59	0,61	0,61
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka, 2022

Pada analisis struktur ekonomi pada distribusi PDRB pada 17 kategori lapangan usaha, maka terlihat sektor primer masih sangat mendominasi pembentukan perekonomian daerah dimana dominasi terbesar pada struktur ekonomi Buton Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (32,83%) dan sektor pertambangan dan penggalian (26,92%). Kedua sektor ini sudah sangat mendominasi struktur ekonomi Buton Selatan bahkan lebih dari 50 persen dari total pembentukan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pada kedua sektor ini jika dioptimalkan maka akan memberi dampak signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Buton Selatan 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota										Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan					
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6(Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan					
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
Kab. Buton Selatan	6204	6204	100%	104	104	100%	7	7	100%	134.598.766.351	117.988.992.933	

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel. 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Buton Selatan	2020	1730	86%	1928	1723	89%	1686	1634	97%	8980	3286	37%	15424	2642	17%	44151	3802	9%	8610	7842	91%
SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																					
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/Preventif.			Pagu Anggaran SPM (Rp)		Realisasi Anggaran SPM (Rp)				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran		
20682	4856	23%	252	252	100%	196	196	100%	242	135	56%	2533	2533	100%	84.240.925.806	70.066.709.650					

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

Kabupaten	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Buton Selatan	15994	9783	61,16%	23846	696	2,91%	45.984.783.539	45.485.477.941

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

Kabupaten	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Buton Selatan	2782	2782	100,%	-	-	0%	8.171.449.709	7.851.549.320

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

Kabupaten	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Buton Selatan	100	100	100%	583	340	58,32%	-	-	0%	-	-	0%	7	6	85,71%	9.276.932.680	9.132.216.313

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022

Kabupaten	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Buton Selatan	450	424	94%	158	158	100%	2000	157	8%	-	-	0,00%	30	30	100%	5.478.808.654	5.423.588.807

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Buton Selatan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Buton Selatan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 namun belum tersertifikasi;
2. Belum merata dan optimalnya akses, kualitas dan tenaga pendidikan;
3. Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasarana pada setiap Sekolah masih sangat kurang dan belum memenuhi Standar Pendidikan;
4. Beberapa SD dan SMP belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
5. Belum tuntasnya wajib belajar Pendidikan 9 tahun akibat dari capaian Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan metode perhitungan baru belum mencapai angka 7,58 Tahun;
6. Minimnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD dan SMP di daerah.
7. Terdapat 4 wilayah kecamatan yang masih terisolasi (kecamatan Batuatas, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat, dan Kecamatan Kadatua) sehingga pelayanan terkait pendataan dan pelaksanaan penerapan SPM agak sulit disebabkan karena keempat wilayah kecamatan tersebut berada di kepulauan yang dikelilingi laut yang terpisah dari ibu kota kabupaten buton selatan, angkutan transportasi laut masih kurang, pembangkit listrik dan telekomunikasi belum memadai.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;
2. Minimnya sarana pendukung listrik, internet, komunikasi dan alat transportasi;
3. Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap;
4. Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama pada faskes;
5. Kurangnya pemahaman terhadap pengumpulan data jumlah penduduk.
6. Terdapat 4 wilayah kecamatan yang masih terisolasi (kecamatan Batuatas, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat, dan Kecamatan Kadatua) sehingga pelayanan terkait pendataan dan pelaksanaan penerapan SPM agak sulit disebabkan karena keempat wilayah kecamatan tersebut berada di kepulauan yang dikelilingi laut yang terpisah dari ibu kota kabupaten buton selatan, angkutan transportasi laut masih kurang, pembangkit listrik dan telekomunikasi belum memadai.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Buton Selatan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;
- 2) Belum tersedianya basis data yang akurat;

- 3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM seperti jaringan air bersih layak minum.
- 5) Terdapat 4 wilayah kecamatan yang masih terisolasi (kecamatan Batuatas, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat, dan Kecamatan Kadatua) sehingga pelayanan terkait pendataan dan pelaksanaan penerapan SPM agak sulit disebabkan karena keempat wilayah kecamatan tersebut berada di kepulauan yang dikelilingi laut yang terpisah dari ibu kota kabupaten buton selatan, angkutan transportasi laut masih kurang, pembangkit listrik dan telekomunikasi belum memadai.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Buton Selatan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya alokasi anggaran;
- 2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
- 4) Status Tanah yang tidak jelas;
- 5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.
- 6) Terdapat 4 wilayah kecamatan yang masih terisolasi (kecamatan Batuatas, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat, dan Kecamatan Kadatua) sehingga pelayanan terkait pendataan dan pelaksanaan penerapan SPM agak sulit disebabkan karena keempat wilayah kecamatan tersebut berada di kepulauan yang dikelilingi laut yang terpisah dari ibu kota kabupaten buton selatan, angkutan transportasi laut masih kurang, pembangkit listrik dan telekomunikasi belum memadai.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Buton Selatan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 2) Tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 5) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai;
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- 7) Terdapat 4 wilayah kecamatan yang masih terisolasi (kecamatan Batuatas, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat, dan Kecamatan Kadatua) sehingga pelayanan terkait pendataan dan pelaksanaan penerapan SPM agak sulit disebabkan karena keempat wilayah kecamatan tersebut berada di kepulauan yang dikelilingi laut yang terpisah dari ibu kota kabupaten buton selatan, angkutan transportasi laut masih kurang, pembangkit listrik dan telekomunikasi belum memadai.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Buton Selatan berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;

- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial ;
- 5) Kondisi kehidupan sosial masyarakat yang tidak paham dan beranggapan tidak terhadap program dan kegiatan Disabilitas sosial;
- 6) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;
- 8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.
- 9) Terdapat 4 wilayah kecamatan yang masih terisolasi (kecamatan Batuatas, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat, dan Kecamatan Kadatua) sehingga pelayanan terkait pendataan dan pelaksanaan penerapan SPM agak sulit disebabkan karena keempat wilayah kecamatan tersebut berada di kepulauan yang dikelilingi laut yang terpisah dari ibu kota kabupaten buton selatan, angkutan transportasi laut masih kurang, pembangkit listrik dan telekomunikasi belum memadai.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Buton Selatan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas	
		2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	
	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	
		2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	
	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk	Pendidik dan tenaga kependidikan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			pada Usia Pendidikan Dasar	
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
			11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada	Unit Rumah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			Relokasi Program Provinsi	

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN
				Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		2		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan	Desa/Kelurahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
				Pemadam Kebakaran	
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang

Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Buton Selatan 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
Kabupaten/Kota																		
1)	Pendidikan Anak Usia Dini	2022	3,394				5,158,163,000	1800	APBD, DAK FISIK, DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	3462	3116			5,158,163,000	346	APBD, DAK FISIK, DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
1	Buku Gambar		2,300				23,000,000	55	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	2346	2111			23,460,000	235	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
2	Alat Mewarnai		2,300				115,000,000	229	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	2346	2111			117,300,000	235	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		1,800				1,188,000,000	16381	APBD	DINAS PENDIDIKAN	1836	1652			1,211,760,000	184	APBD	DINAS PENDIDIKAN
4	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		55				417,992,000	0	APBD	DINAS PENDIDIKAN	55	50			459,791,200	6	APBD	DINAS PENDIDIKAN
5	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		229				720,000,000	1	APBD	DINAS PENDIDIKAN	234	210			734,400,000	23	APBD	DINAS PENDIDIKAN
2)	Pendidikan Dasar	2022	16381				65,398,900,300	0	APBD, DAK	DINAS PENDIDIKAN	16709	15038			71,938,790,330	1671	APBD, DAK	DINAS PENDIDIKAN
1	Buku Teks Pelajaran							0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	500	450			15,000,000.00	50	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
2	Perlengkapan Belajar		1				125,000,000	0	DAK FISIK	DINAS PENDIDIKAN	20	18			2,500,000,000	2	DAK FISIK	DINAS PENDIDIKAN
3	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV							0	APBD	DINAS PENDIDIKAN	99	89			300,000,000	10	APBD	DINAS PENDIDIKAN
4	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga							1651		DINAS PENDIDIKAN	281	253			150,000,000	28	APBD	DINAS PENDIDIKAN

	Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat																
5	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan						0		DINAS PENDIDIKAN	747	672			500,000,000	75	APBD	DINAS PENDIDIKAN
6	Penyediaan biaya personil peserta didik						105		DINAS PENDIDIKAN	1230	1107			861,000,000	123	APBD	DINAS PENDIDIKAN
7	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		1651			2,615,352,300	3	APBD	DINAS PENDIDIKAN	1684	1516			2,667,659,346	168	APBD	DINAS PENDIDIKAN
8	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c						6		DINAS PENDIDIKAN		0				0	APBD	DINAS PENDIDIKAN
3)	Pendidikan Kesetaraan	2022	105			200,920,000	13	APBD, DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	107	96			221,012,000	11	APBD, DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
1	Modul Belajar		3			10,650,000	8	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	64	58			227,200,000	6	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
2	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)		6			100,460,000	1	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	7	6			110,506,000	1	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik		13			31,200,000	3	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	14	13			34,320,000	1	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
4	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV		8			19,200,000	0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	9	8			21,120,000	1	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV		1			2,400,000	3	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	1	1			2,640,000	0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
6	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat		3			7,200,000	1800	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	3	3			7,920,000	0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
7	Perlengkapan belajar						55		DINAS PENDIDIKAN	0	0				0		DINAS PENDIDIKAN
8	PKBM Terakreditasi minimal C		3				229	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	3	3				0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	Kabupaten/Kota																
1)	Pendidikan Anak Usia Dini	3531	3178			5,673,979,300	353	APBD, DAK FISIK, DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	3602	3242			6,241,377,230	360	APBD, DAK FISIK, DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
1	Buku Gambar	2393	2154			23,929,200	239	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	2441	2197			24,407,784	244	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
2	Alat Mewarnai	2393	2154			119,646,000	239	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	2441	2197			122,038,920	244	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1873	1685			1,235,995,200	187	APBD	DINAS PENDIDIKAN	1910	1719			1,260,715,104	191	APBD	DINAS PENDIDIKAN
4	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	56	50			505,770,320	6	APBD	DINAS PENDIDIKAN	57	51			556,347,352	6	APBD	DINAS PENDIDIKAN
5	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	238	214			749,088,000	24	APBD	DINAS PENDIDIKAN	243	219			764,069,760	24	APBD	DINAS PENDIDIKAN
2)	Pendidikan Dasar	17043	15339			79,132,669,363	1704	APBD, DAK	DINAS PENDIDIKAN	17384	15645			87,045,936,299	1738	APBD, DAK	DINAS PENDIDIKAN
1	Buku Teks Pelajaran	510	459			15,300,000.00	51	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	520	468			15,606,000.00	52	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
2	Perlengkapan Belajar	20	18			2,550,000,000	2	DAK FISIK	DINAS PENDIDIKAN	21	19			2,601,000,000	2	DAK FISIK	DINAS PENDIDIKAN
3	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	101	91			330,000,000	10	APBD	DINAS PENDIDIKAN	103	93			363,000,000	10	APBD	DINAS PENDIDIKAN
4	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	287	258			165,000,000	29	APBD	DINAS PENDIDIKAN	292	263			181,500,000	29	APBD	DINAS PENDIDIKAN

5	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	762	686			550,000,000	76	APBD	DINAS PENDIDIKAN	777	699			605,000,000	78	APBD	DINAS PENDIDIKAN
6	Penyediaan biaya personil peserta didik	1255	1129			878,220,000	125	APBD	DINAS PENDIDIKAN	1280	1152			895,784,400	128	APBD	DINAS PENDIDIKAN
7	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1718	1546			2,721,012,533	172	APBD	DINAS PENDIDIKAN	1752	1577			2,775,432,784	175	APBD	DINAS PENDIDIKAN
8	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	0	0			-	0	APBD	DINAS PENDIDIKAN	0	0			-	0	APBD	DINAS PENDIDIKAN
3)	Pendidikan Kesetaraan	109	98			243,113,200	11	APBD, DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	111	100			267,424,520	11	APBD, DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
1	Modul Belajar	67	60			238,560,000	7	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	71	64			250,488,000	7	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
2	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	7	6			121,556,600	1	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	7	7			133,712,260	1	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	15	14			37,752,000	2	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	16	14			41,527,200	2	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
4	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	9	8			23,232,000	1	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	10	9			25,555,200	1	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1	1			2,904,000	0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	1	1			3,194,400	0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
6	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	3	3			8,712,000	0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	4	3			9,583,200	0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN
7	Perlengkapan belajar	0	0				0		DINAS PENDIDIKAN	0	0				0		DINAS PENDIDIKAN
8	PKBM Terakreditasi minimal C	3	3				0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN	4	3				0	DAK NON FISIK	DINAS PENDIDIKAN

Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Buton Selatan 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	Kabupaten/Kota																	
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2022	2,011	2,011	100	100	1,662,987,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	1,662,987,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2022	2,011	2,011	100	100	16,309,210		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	16,309,210		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tablet Tambah Darah	2022	2,011	2,011	100	100	522,860		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	522,860		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2022	2,011	2,011	100	100	603,300		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	603,300		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	2022	2,011	2,011	100	100	603,300		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	603,300		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2022	2,011	2,011	100	100	603,300,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	603,300,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter/dokter spesialis kebidanan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2022	1,919	1,919	100	100	427,750,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	1,919	1,919	100	100	427,750,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Formulir Partograf	2022	1,919	1,919	100	100	575,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,919	1,919	100	100	575,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Kartu ibu (rekam medis)	2022	1,919	1,919	100	100	575,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,919	1,919	100	100	575,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2022	1,919	1,919	100	100	575,700,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,919	1,919	100	100	575,700,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

5	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2022	1,828	1,828	100	100	276,900,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	276,900,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin Hepatitis BO	2022	1,828	1,828	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Vitamin K1 Injeksi	2022	1,828	1,828	100	100	674,532		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	674,532		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	2022	1,828	1,828	100	100	25,619,420		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	25,619,420		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Bayi Baru Lahir	2022	1,828	1,828	100	100	548,400		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	548,400		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2022	1,828	1,828	100	100	1,096,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	1,096,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2022	1,828	1,828	100	100	548,400,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	548,400,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
7	Dokter/dokter spesialis Anak	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	2022	8,973	8,973	100	100	489,090,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	489,090,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	2022	8,973	8,973	100	100	5,383,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	5,383,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	2022	8,973	8,973	100	100	5,383,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	5,383,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2022	8,973	8,973	100	100	2,691,900,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	2,691,900,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Vitamin A Biru	2022	8,973	8,973	100	100	3,311,037		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	3,311,037		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Vitamin A Merah	2022	8,973	8,973	100	100	5,958,072		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	5,958,072		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB	2022	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN

	-Hib, Campak, Rubella																	
7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2022	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2022	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
9	Peralatan Anafilaktik	2022	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
10	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Dokter	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
13	Ahli Gizi	2022	1	1	100	100					1	1	100	100				
14	Guru PAUD	2022			100	100							100	100				
15	Kader Kesehatan	2022																
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2022	11,190	11,190	100	100	491,540,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	11,190	11,190	100	100	491,540,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Buku Raport Sehatanku	2022	500	500	100	100	100,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	500	500	100	100	100,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Buku Pemantauan Kesehatan	2022	500	500	100	100	10,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	500	500	100	100	10,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	2022	11190	11190	100	100	6,714,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	11190	11190	100	100	6,714,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	2022	1000	1000	100	100	300,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1000	1000	100	100	300,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	2022	500	500	100	100	150,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	500	500	100	100	150,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter/Dokter gigi	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

7	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Ahli Gizi	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Guru	2022																
12	Kader Kesehatan	2022																
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2022	47,166	47,166	100	100	221,900,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	47,166	47,166	100	100	221,900,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	2022	39	39	100	100	6,806,053,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	39	39	100	100	6,806,053,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2022	13	13	100	100	14,149,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	14,149,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Dokter	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Ahli Gizi	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	2022	8,909	8,909	100	100	1,097,465,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	8,909	8,909	100	100	1,097,465,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	2022	8909	8909	100	100	1,285,568,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8909	8909	100	100	1,285,568,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	2022	100	100	100	100	600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	100	100	100	100	600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kesehatan Lansia	2022	500	500	100	100	50,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	500	500	100	100	50,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Dokter	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Ahli Gizi	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2022	1	1	100	100					1	1	100	100				
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2022	47,166	47,166	100	100	83,925,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	47,166	47,166	100	100	83,925,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tensimeter	2022	36	36	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	36	36	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2022	13	13	100	100	14,149,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	14,149,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN

4	Dokter	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2022	399	399	100	100	77,325,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	399	399	100	100	77,325,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2022	399	399	100	100	87,041,850		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	399	399	100	100	87,041,850		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2022	399	399	100	100	87,041,850		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	399	399	100	100	87,041,850		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Dokter	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Ahli Gizi	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2022	196	196	100	100	255,108,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	196	196	100	100	255,108,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2022	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN

2	Kit berisi 2 alat fiksasi	2022	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2022	13	13	100	100	7,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	7,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2022	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2022	245	245	100	100	376,457,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	376,457,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2022	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Reagen Zn TB	2022	245	245	100	100	48,257,895		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	48,257,895		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	2022	245	245	100	100	36,695,120		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	36,695,120		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2022	245	245	100	100	995,310,050		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	995,310,050		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Catridge tes cepat molekuler	2022	245	245	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	2022	245	245	100	100	73,500		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	73,500		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	2022	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
8	Dokter/ spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

10	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Penata Rontgen	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan masyarakat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
13	Tenaga kesehatan non kesehatan terlatih atau mempunyai	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2022	2545	2545	100	100	288,465,400		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	2545	2545	100	100	288,465,400		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	2022	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2022	2545	2545	100	100	18,196,750		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2545	2545	100	100	18,196,750		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2022	2545	2545	100	100	149,773,250		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2545	2545	100	100	149,773,250		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	2022	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

6	Perawat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Bidan	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan masyarakat	2022	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Tenaga kesehatan non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	2022	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	35
	Kabupaten/Kota																
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2,011	2,011	100	100	1,662,987,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	1,662,987,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2,011	2,011	100	100	16,309,210		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	16,309,210		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tablet Tambah Darah	2,011	2,011	100	100	522,860		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	522,860		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2,011	2,011	100	100	603,300		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	603,300		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	2,011	2,011	100	100	603,300		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	603,300		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2,011	2,011	100	100	603,300,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2,011	2,011	100	100	603,300,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter/dokter spesialis kebidanan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

7	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,919	1,919	100	100	427,750,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	1,919	1,919	100	100	427,750,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Formulir Partograf	1,919	1,919	100	100	575,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,919	1,919	100	100	575,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Kartu ibu (rekam medis)	1,919	1,919	100	100	575,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,919	1,919	100	100	575,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1,919	1,919	100	100	575,700,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,919	1,919	100	100	575,700,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1,828	1,828	100	100	276,900,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	276,900,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Vaksin Hepatitis BO	1,828	1,828	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Vitamin K1 Injeksi	1,828	1,828	100	100	674,532		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	674,532		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	1,828	1,828	100	100	25,619,420		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	25,619,420		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Bayi Baru Lahir	1,828	1,828	100	100	548,400		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	548,400		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	1,828	1,828	100	100	1,096,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	1,096,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1,828	1,828	100	100	548,400,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1,828	1,828	100	100	548,400,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
7	Dokter/dokter spesialis Anak	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

4)	Pelayanan Kesehatan Balita	8,973	8,973	100	100	489,090,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	489,090,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	8,973	8,973	100	100	5,383,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	5,383,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	8,973	8,973	100	100	5,383,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	5,383,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	8,973	8,973	100	100	2,691,900,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	2,691,900,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Vitamin A Biru	8,973	8,973	100	100	3,311,037		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	3,311,037		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Vitamin A Merah	8,973	8,973	100	100	5,958,072		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100	5,958,072		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
9	Peralatan Anafilaktik	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8,973	8,973	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
10	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Dokter	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
13	Ahli Gizi	1	1	100	100					1	1	100	100				
14	Guru PAUD			100	100							100	100				
15	Kader Kesehatan																
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	11,190	11,190	100	100	491,540,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	11,190	11,190	100	100	491,540,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Buku Raport Sehatanku	500	500	100	100	100,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	500	500	100	100	100,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN

2	Buku Pemantauan Kesehatan	500	500	100	100	10,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	500	500	100	100	10,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	11190	11190	100	100	6,714,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	11190	11190	100	100	6,714,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	1000	1000	100	100	300,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	1000	1000	100	100	300,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	500	500	100	100	150,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	500	500	100	100	150,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Dokter/Dokter gigi	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Ahli Gizi	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Guru																
12	Kader Kesehatan																
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	47,166	47,166	100	100	221,900,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	47,166	47,166	100	100	221,900,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	39	39	100	100	6,806,053,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	39	39	100	100	6,806,053,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN

3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	13	13	100	100	14,149,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	14,149,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Dokter	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Ahli Gizi	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	8,909	8,909	100	100	1,097,465,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	8,909	8,909	100	100	1,097,465,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	8909	8909	100	100	1,285,568,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	8909	8909	100	100	1,285,568,700		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	100	100	100	100	600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	100	100	100	100	600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Buku Kesehatan Lansia	500	500	100	100	50,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	500	500	100	100	50,000,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Dokter	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Ahli Gizi	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	1	1	100	100					1	1	100	100				
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	47,166	47,166	100	100	83,925,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	47,166	47,166	100	100	83,925,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tensimeter	36	36	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	36	36	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	13	13	100	100	14,149,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	14,149,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Dokter	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	399	399	100	100	77,325,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	399	399	100	100	77,325,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	399	399	100	100	87,041,850		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	399	399	100	100	87,041,850		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	399	399	100	100	87,041,850		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	399	399	100	100	87,041,850		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Dokter	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
5	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

6	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Ahli Gizi	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	196	196	100	100	255,108,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	196	196	100	100	255,108,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Kit berisi 2 alat fiksasi	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	13	13	100	100	7,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	7,800		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	245	245	100	100	376,457,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	376,457,000		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Reagen Zn TB	245	245	100	100	48,257,895		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	48,257,895		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
3	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	245	245	100	100	36,695,120		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	36,695,120		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN

4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	245	245	100	100	995,310,050		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	995,310,050		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Catridge tes cepat molekuler	245	245	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	245	245	100	100	73,500		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	245	245	100	100	73,500		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
11	Penata Rontgen	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
12	Tenaga kesehatan masyarakat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
13	Tenaga kesehatan non terlatih atau mempunyai	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2545	2545	100	100	288,465,400		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN	2545	2545	100	100	288,465,400		APBD/APBN	DINAS KESEHATAN
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100	2,600,000		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2545	2545	100	100	18,196,750		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2545	2545	100	100	18,196,750		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN

3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2545	2545	100	100	149,773,250		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	2545	2545	100	100	149,773,250		APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN	13	13	100	100			APBN/APBD	DINAS KESEHATAN
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
6	Perawat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
7	Bidan	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
9	Tenaga kesehatan masyarakat	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	2	2	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN	1	1	100	100			APBN	DINAS KESEHATAN

Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Selatan 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2022	170	-	170	-	1,206,729,000	-	DAK (Penugasan)	DPUPR Kab. Buton Selatan	1590	-	1590	-	8,830,000,000	-	APBD/APBN/DAK	DPUPR Kab. Buton Selatan
1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)		170	-	-	-	-	-	-	-	990	-	-	-	-	-	-	-
2	Kualitas air (keruh, berwarna, berbau, berbusa, berbau)		3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
3	Jaringan perpipaan		170	-	-	-	-	-	-	-	990	-	-	-	-	-	-	-
4	Jaringan bukan perpipaan		70	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2022	567	-	567	-	7,152,704,000	-	DAK (Penugasan)	DPUPR Kab. Buton Selatan	1325	-	1325	-	11,280,000,000	-	APBD/APBN/DAK	DPUPR Kab. Buton Selatan
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik		567	-	-	-	-	-	-	-	1325	-	-	-	-	-	-	-
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik		567	-	-	-	-	-	-	-	1325	-	-	-	-	-	-	-
3	Sub-Sistem pengolahan setempat		567	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
4	Sub-sistem pengangkutan		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengolahan lumpur tinja		-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	35
	Kabupaten/Kota																
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1660	-	1660	-	7,800,000,000	-	ABPD/A PBN/DAK	PUPR Kab. Buton Selatan	1730	-	1730	-	7,840,000,000	-	ABPD/APBN/DAK	PUPR Kab. Buton Selatan
1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1660	-	-	-	-	-	-	-	1730	-	-	-	-	-	-	-
2	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
3	Jaringan perpipaan	960	-	-	-	-	-	-	-	930	-	-	-	-	-	-	-
4	Jaringan bukan perpipaan	703	-	-	-	-	-	-	-	803	-	-	-	-	-	-	-
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1425	-	1425	-	11,300,000,000	-	ABPD/A PBN/DAK	PUPR Kab. Buton Selatan	1525	-	1525	-	11,320,000,000	-	ABPD/APBN/DAK	PUPR Kab. Buton Selatan
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	1425	-	-	-	-	-	-	-	1525	-	-	-	-	-	-	-
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	1425	-	-	-	-	-	-	-	1525	-	-	-	-	-	-	-
3	Sub-Sistem pengolahan setempat	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-
4	Sub-sistem pengangkutan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	250	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Selatan 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2022	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	2022	5	5	100	100	30,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	30,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	2022	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	2022	5	5	100	100	500,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	500,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	2022	5	5	100	100	500,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	500,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2022	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	2022	5	5	100	100	60,750,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	60,750,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
2	Subsidi uang sewa	2022	5	5	100	100	30,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	30,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
3	Penyediaan rumah layak huni	2022	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	5	5	100	100	30,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	30,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	5	5	100	100	500,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	500,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	5	5	100	100	500,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	500,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	5	5	100	100	60,750,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	60,750,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
2	Subsidi uang sewa	5	5	100	100	30,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	30,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM
3	Penyediaan rumah layak huni	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM	5	5	100	100	125,000,000		APBD/APBN	DINAS PERKIM

Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Buton Selatan 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	Kabupaten/Kota																	
1)	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	2022	1	1	100	1	508,000,000	-	APBD / APBN	SATPOL PP	1	1	100	1	508,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	2022	1	1	100	1	20,000,000	-	APBD / APBN	SATPOL PP	1	1	100	1	20,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	2022	1	1	100	1	10,000,000	-	APBD / APBN	SATPOL PP	1	1	100	1	10,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	2022	35	35	100	35	-	-	APBD / APBN	SATPOL PP	35	35	100	35	-	-	APBD / APBN	SATPOL PP
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	2022	1	1	100	1	47,000,000	-	APBD / APBN	SATPOL PP	1	1	100	1	47,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	2022	150	150	100	150	361,000,000	-	APBD / APBN	SATPOL PP	150	150	100	150	361,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2022	20	20	100	20	55,000,000	-	APBD / APBN	SATPOL PP	20	20	100	20	55,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	2022	Masyarakat						APBD	BPBD	Masyarakat						APBD	BPBD
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	2022	BPBD		1 dokumen		350,000,000		APBD	BPBD	BPBD		1 dokumen		350,000,000.00		APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2022	Masyarakat		150		10,000,000		APBD	BPBD	Masyarakat		200		15,000,000.00		APBD	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	2022	Masyarakat		250		20,000,000		APBD	BPBD	Masyarakat		300		25,000,000.00		APBD	BPBD
4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	2022	Masyarakat		10		25,000,000		APBD	BPBD	Masyarakat		15		30,000,000.00		APBD	BPBD
5	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	2022	Masyarakat		150		20,000,000		APBD	BPBD	Masyarakat		175		25,000,000.00		APBD	BPBD

3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2022	Masyarakat						APBD	BPBD	Masyarakat					APBD	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	2022	BPBD		25		50,000,000		APBD	BPBD	BPBD		25		50,000,000.00	APBD	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	2022	BPBD		20		80,000,000		APBD	BPBD	BPBD		20		80,000,000.00	APBD	BPBD
4)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2022							APBD	BPBD						APBD	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2022	BPBD		1 tahun		150,000,000		APBD	BPBD	BPBD		1 tahun		150,000,000.00	APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	2022	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000		APBD	BPBD	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000.00	APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	2022	Masyarakat		Per kejadian		50,000,000		APBD	BPBD	Masyarakat		Per kejadian		50,000,000.00	APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	2022	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000		APBD	BPBD	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000.00	APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2022	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000		APBD	BPBD	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000.00	APBD	BPBD
5)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	2022	15	15	100	100	1,897,000,000		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	20	20	100	100	2,086,700,000.00	APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	2022	15	15	100	100	583,088,000		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	20	20	100	100	641,396,800.00	APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2022	10	10	100	100	-		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	5	5	100	100	36,750,000.00	APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2022	19	19	100	100	-		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	45	45	100	100	4,734,500,000.00	APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	2022	4	4	100	100	-		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	15	15	100	100	250,500,000.00	APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	1.00	1.00	100.00	1.00	508,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP	1.00	1.00	100.00	1.00	508,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1.00	1.00	100.00	1.00	20,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP	1.00	1.00	100.00	1.00	20,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1.00	1.00	100.00	1.00	10,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP	1.00	1.00	100.00	1.00	10,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	35.00	35.00	100.00	35.00	-	-	APBD / APBN	SATPOL PP	35.00	35.00	100.00	35.00	-	-	APBD / APBN	SATPOL PP
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	1.00	1.00	100.00	1.00	47,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP	1.00	1.00	100.00	1.00	47,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	150.00	150.00	100.00	150.00	361,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP	150.00	150.00	100.00	150.00	361,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	20.00	20.00	100.00	20.00	55,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP	20.00	20.00	100.00	20.00	55,000,000.00	-	APBD / APBN	SATPOL PP
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	Masyarakat						APBD	BPBD	Masyarakat						APBD	BPBD
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	BPBD		1 dokumen		350,000,000.00		APBD	BPBD	BPBD		1 dokumen		350,000,000.00		APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Masyarakat		200.00		15,000,000.00		APBD	BPBD	Masyarakat		200.00		15,000,000.00		APBD	BPBD

3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Masyarakat		300.00		25,000,000.00		APBD	BPBD	Masyarakat		300.00		25,000,000.00		APBD	BPBD	
4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	Masyarakat		15.00		30,000,000.00		APBD	BPBD	Masyarakat		15.00		30,000,000.00		APBD	BPBD	
5	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	Masyarakat		175.00		25,000,000.00		APBD	BPBD	Masyarakat		175.00		25,000,000.00		APBD	BPBD	
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Masyarakat						APBD	BPBD	Masyarakat						APBD	BPBD	
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	BPBD		25.00		50,000,000.00		APBD	BPBD	BPBD		25.00		50,000,000.00		APBD	BPBD	
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	BPBD		20.00		80,000,000.00		APBD	BPBD	BPBD		20.00		80,000,000.00		APBD	BPBD	
4)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							APBD	BPBD							APBD	BPBD	
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	BPBD		1 tahun		150,000,000.00		APBD	BPBD	BPBD		1 tahun		150,000,000.00		APBD	BPBD	
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000.00		APBD	BPBD	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000.00		APBD	BPBD	
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	Masyarakat		Per kejadian		50,000,000.00		APBD	BPBD	Masyarakat		Per kejadian		50,000,000.00		APBD	BPBD	
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000.00		APBD	BPBD	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000.00		APBD	BPBD	
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000.00		APBD	BPBD	Masyarakat		Per kejadian		20,000,000.00		APBD	BPBD	
5)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		25.00	25.00	100.00	100.00	2,295,370,000.00		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	25.00	25.00	100.00	100.00	2,524,907,000.00		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi		25.00	25.00	100.00	100.00	705,536,480.00		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	25.00	25.00	100.00	100.00	776,090,128.00		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN

									N									
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	6.00	6.00	100.00	100.00	40,425,000.00			APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	7.00	7.00	100.00	100.00	44,467,500.00		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	45.00	45.00	100.00	100.00	5,207,950,000.00			APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	45.00	45.00	100.00	100.00	5,728,745,000.00		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	17.00	17.00	100.00	100.00	275,550,000.00			APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN	19.00	19.00	100.00	100.00	303,105,000.00		APBN/D AU/APBD	DINAS DAMKAR & PENYELAMATAN

Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Buton Selatan 2023-2026

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8.00	9	10	11	12	13	14	15	16.00	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti																	
1	Layanan data dan pengaduan	2022	95	47	-	-	7,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	100	50	-	-	10,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL

2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2022	95	47			22,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	100	50		25,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan permakanan	2022	75	47			22,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	80	50	-	25,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan sandang	2022	75	47			22,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	80	50	-	25,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan alat bantu	2022	35	7			22,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	40	10	-	25,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
7	Penyediaan perbekalan kesehatan	2022						-							-		
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2022	95	30			86,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	100	50	-	125,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
9	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	2022	95	67			122,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	100	70	-	125,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
10	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2022	45	22	-	-	7,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	50	25	-	10,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
11	Akses ke layanan pendidikan	2022	45	17	-	-	12,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	50	20	-	15,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2022			-	-							-	-	-	-	-

13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2022	5	2	-	-	9,500,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	10	5	-	-	12,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
14	Layanan rujukan	2022	5	2	-	-	12,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	10	5	-	-	15,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	2022	90	60			75,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	100	70			85,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	80	35	-	-	5,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan permakanan layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan sandang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	80	35	-	-	20,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	60	35	-	-	20,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	60	35	-	-	20,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	-	-	20,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	80	35	-	-	120,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	80	55	-	-	120,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10	-	-	5,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	30	5	-	-	10,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	-	-	7,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5	-	-	10,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	2022																
1	Layanan data dan pengaduan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan permakanan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan sandang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan alat bantu	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2022	95	30			114,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	100	50	-	-	125,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	2022	95	67			122,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	100	70			125,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Akses ke layanan pendidikan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Layanan rujukan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	2022																
1	Layanan data dan pengaduan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan permakanan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan sandang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan alat bantu	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Akses ke layanan pendidikan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Layanan rujukan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2022	40	35	-	-	32,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	40	35	-	-	32,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan	2022	60	45	-	-	23,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	70	50	-	-	25,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang	2022	60	45	-	-	23,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	70	50	-	-	25,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2022	20	3	-	-	43,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	20	3	-	-	45,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	2022	20	5	-	-	33,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	20	5	-	-	35,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan psikososial	2022	20	3	-	-	23,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	20	3	-	-	25,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	Kabupaten/Kota																
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti																
1	Layanan data dan pengaduan	110	55	-	-	15,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	115	60	-	-	18,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	110	55	-	-	30,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	115	60	-	-	33,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan permakanan	90	55	-	-	30,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	95	60	-	-	33,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan sandang	90	55	-	-	30,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	95	60	-	-	33,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
6	Penyediaan alat bantu	50	15	-	-	30,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	55	20	-	-	33,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
7	Penyediaan perbekalan kesehatan			-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	110	55	-	-	130,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	115	60	-	-	133,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
9	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	110	75	-	-	130,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	115	80	-	-	133,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
10	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	60	30	-	-	15,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	65	35	-	-	18,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
11	Akses ke layanan pendidikan	60	25	-	-	20,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	65	30		-	23,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	10	-	-	17,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	25	15	-	-	20,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
14	Layanan rujukan	20	10	-	-	20,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	25	15	-	-	23,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	110	80	-	-	95,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	120	90			100,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	83	38	-	-	6,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	85	39	-	-	8,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL

2	Penyediaan permakanan layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-
3	Penyediaan sandang	83	38	-	-	21,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	85	39	-	-	23,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu	63	38	-	-	21,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	65	39	-	-	23,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	63	38	-	-	21,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	65	39	-	-	23,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	23	8	-	-	21,500,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	25	9	-	-	23,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	83	38	-	-	121,500,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	85	39	-	-	123,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan	83	58	-	-	121,500,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	85	59	-	-	123,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	33	13	-	-	6,500,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	35	14	-	-	8,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	33	8	-	-	11,500,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	35	9	-	-	13,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
12	Layanan rujukan			-	-							-	-	1,500,000.00			
13	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	18	8	-	-	9,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	20	9	-	-	10,500,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	18	8	-	-	11,500,000.00		APBD	DINAS SOSIAL	20	9	-	-	13,000,000.00		APBD	DINAS SOSIAL
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Layanan data dan pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyediaan permakanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan sandang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan alat bantu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	110	55	-	-	130,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	115	60	-	-	133,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	110	75	-	-	130,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	115	80	-	-	133,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Akses ke layanan pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Layanan rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Layanan data dan pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti																
3	Penyediaan permakanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
4	Penyediaan sandang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
5	Penyediaan alat bantu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
10	Akses ke layanan pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
13	Layanan rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-
15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40	35	-	-	32,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	40	35	-	-	32,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
1	Penyediaan permakanan	70	55	-	-	28,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	80	60	-	-	30,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan sandang	70	55	-	-	28,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	80	60	-	-	30,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	20	5	-	-	48,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	30	10	-	-	50,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	20	10	-	-	38,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	30	15	-	-	40,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL
5	Pelayanan dukungan psikososial	20	5	-	-	28,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL	30	10	-	-	30,000,000.00	-	APBD	DINAS SOSIAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.

- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Buton Selatan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi,** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
 - 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

- 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan**. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
 - 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi

tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Buton Selatan masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Buton Selatan.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Buton Selatan berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Buton Selatan secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Buton Selatan.

Pj. BUPATI BUTON SELATAN

LA ODE BUDIMAN